

PERGESERAN POLITIK ALIRAN MENJADI POLITIK TRANSAKSIONAL DALAM PILKADA TULUNGAGUNG

Datu Jatmiko

Universitas Negeri Yogyakarta
jatmikodatu@uny.ac.id

Abstract

This article aims to find out the shift in political flow to transactional politics that occurred in the direct regional head election of Tulungagung Regency, East Java Province in 2018. One of the reasons for this political shift is the increasingly pragmatic voters due to the demands of the situation and conditions of the community. Including economic problems due to demands in an increasingly capitalist social system. In addition to a political shift, in Tulungagung Regency, East Java Province, it has also been in the spotlight by the local and national community because the elected regent and deputy regent pair were caught in legal trouble, namely the elected regent and incumbent regent became a suspect in a corruption case and became a prisoner at the Corruption Eradication Commission (KPK). The results of this study also indicate that there are many reasons why the regent who was entangled in legal problems was re-elected.

Keywords: Politics, Stream, Transactional, Tulungagung

Abstrak

Artikel ini bertujuan mengetahui pergeseran politik aliran menjadi politik transaksional yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah langsung Kabupaten Tulungagung pada tahun 2018. Pergeseran politik tersebut salah satunya disebabkan semakin pragmatisnya para pemilih yang disebabkan karena tuntutan situasi dan kondisi masyarakat. Termasuk masalah ekonomi akibat tuntutan dalam sistem sosial masyarakat yang semakin kapitalis. Selain terjadi pergeseran politik, di Kabupaten Tulungagung Propinsi Jawa Timur juga menjadi sorotan oleh masyarakat lokal maupun nasional dikarenakan pasangan bupati dan wakil bupati terpilih terjerat masalah hukum, yakni bupati terpilih sekaligus bupati petahana menjadi tersangka kasus korupsi dan menjadi tahanan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasil Penelitian

ini juga menunjukkan ada banyak penyebab kenapa bupati yang terjerat masalah hukum tersebut terpilih kembali.

Kata Kunci: Politik, Aliran, Transaksional, Tulungagung

Article History: Received 22 February 2022, Revised: 05 April 2022, Accepted: 30 April 2022, Available online 01 June 2022

Pendahuluan

Politik identik dengan proses pembuatan dan bagi-bagi kekuasaan di dalam masyarakat. Proses tersebut antara lain seperti proses pembuatan keputusan lebih khususnya dalam sebuah negara. Politik identik dengan seni ataupun ilmu untuk meraih kekuasaan secara nonkonstitusional maupun konstitusional. Selain itu politik juga dapat dilihat dari paradigma yang berbeda, antara lain menurut teori klasik Aristoteles ialah politik diidentikkan dengan sesuatu hal yang berkaitan dengan usaha yang ditempuh oleh warga negara untuk mewujudkan sebuah suatu kebaikan bersama. Politik adalah sebuah kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di dalam sebuah masyarakat.

Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia di antara negara-negara demokrasi lainnya. Walaupun sebagai negara demokrasi terbesar di dunia bukan berarti Indonesia tidak mempunyai masalah dalam proses demokratisasinya. Indonesia masih memiliki banyak masalah yang berkaitan dengan hal tersebut. Salah satu indikator negara demokrasi adalah adanya pemilihan. Di dalam pemilihan tersebut ada salah satu jenis politik yang berkembang pesat di masyarakat yakni politik aliran. Salah satu ciri politik aliran sangat erat kaitannya dengan agama orang Jawa yang diteliti dan ditulis oleh Clifford Geertz yakni orientasi individu untuk memilih partai politik yang bisa dikategorikan menjadi “santri, priyayi dan abangan”. Aliran tersebut dikenal di Masyarakat Jawa yakni santri lebih banyak berpusat di pasar atau perdagangan, priyayi di lingkungan pemerintahan dan abangan lebih berpusat di pedesaan (Clifford Geertz, 195 :vii). Pertanyaan besar saat ini apakah dalam era modern dan kapitalis seperti

saat ini seseorang menentukan dan memilih orientasi politik dan pemimpin masih berdasarkan pada aliran seperti yang diungkapkan Clifford Geertz tersebut ataukah sudah ada pergeseran orientasi dan cara memilih individu dalam berpolitik. Tentunya pertanyaan besar tersebut hanya bisa dijawab dengan penelitian.

Perkembangan zaman yang semakin kapitalis atau materialis mempengaruhi orientasi kehidupan masyarakat dalam skala prioritas termasuk dalam pilihan politik seseorang. Hari ini kita bisa melihat bahwa hubungan sosial selalu dilandasi atas dasar hubungan ekonomi ini berbeda sekali dengan zaman dahulu yakni hubungan ekonomi dilandasi hubungan sosial. Dalam kaitannya dengan pergeseran politik aliran menjadi transaksional kita bias melihat bahwa pilihan politik orang zaman dahulu lebih didasarkan pada aliran misal golongan santri selalu diidentikkan dengan pilihan partai politik PPP, PKB, PKS dan lain-lain, sedangkan golongan priyayi selalu diidentikkan dengan pilihan partai politik Golkar dan Demokrat dan golongan abangan selalu diidentikkan dengan pilihan politik PDI Perjuangan. Hari ini kita melihat justru pilihan politik seseorang didasarkan pada seberapa besar rupiah yang ditawarkan oleh para kontestan pemilihan umum, semakin banyak rupiah yang ditawarkan calon maka semakin besar dia akan dipilih dan terpilih.

Tulungagung merupakan salah satu daerah yang terdapat banyak pondok pesantren dan merupakan daerah yang banyak abangan. Dua hal yang tentunya sangat berlawanan dalam struktur sosialnya. Daerah ini menjadikan daerah yang sulit ditebak dalam perolehan suara, baik itu pemilihan umum presiden maupun legislatif maupun pemilihan kepala daerah beberapa waktu yang lalu, sehingga menarik untuk diteliti karena komposisi abangan dan priyayi nya seimbang maka politik transaksional rentan terjadi di daerah ini. Pada pemilihan umum legislatif dan presiden serta wakil presiden tahun 2014 lalu, partai politik yang menang adalah PDI

Perjuangan disusul oleh Gerindra dan baru PKB ini membuktikan bahwa walaupun banyak terdapat santri tetapi partai yang menang adalah PDI Perjuangan sehingga mengindikasikan adanya pergeseran politik aliran menjadi politik transaksional di Tulungagung.

Penelitian ini berusaha untuk menemukan bahwa masing-masing wilayah atau desa berbeda-beda orientasi politiknya, masih adakah desa atau wilayah di Tulungagung yang sejalan dengan pendapat Clifford Geertz. Pendapat tersebut adalah bahwa memang orientasi politik masih didasarkan pada politik aliran, namun ada juga dusun yang orientasi politiknya berdasarkan pada figur ketokohan, hubungan *patront-client* atau hubungan majikan buruh, politik balas budi dan yang terakhir adalah orientasi politik karena politik transaksional atau *politik wani piro*,¹ seperti yang akan kami teliti di Kabupaten Tulungagung.

Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan sosiologi politik yakni melihat fenomena politik dari sudut pandang sosiologi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini selain menggunakan politik aliran Clifford Geertz, juga menggunakan teori Mark Weber tentang teori otoritas. Teori otoritas ini dibagi menjadi tiga hal yakni otoritas karismatik, otoritas tradisional dan otoritas legal-formal. Otoritas karismatik adalah kekuasaan yang diperoleh seseorang karena wibawa, sedangkan otoritas tradisional diperoleh karena faktor *ascribed* atau keturunan. Adapun otoritas legal formal diperoleh lewat elektoral atau pemilihan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif etnografi. Etnografi adalah sebuah pekerjaan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu kebudayaan. Tujuan utama dari aktivitas ini antara lain untuk memahami nilai-nilai atas paradigma atau pandangan hidup dari sudut pandang

¹ Politik wani piro adalah politik di mana seseorang memilih partai politik atau calon legislatif dengan imbalan transaksi berupa uang, materi atau bantuan lain bukan atas kriteria sifat-sifat yang melekat pada calon tersebut.

masyarakat asli. Penelitian dengan metode etnografi ini cenderung melibatkan aktivitas belajar mengenai dunia orang yang telah belajar melihat, mendengar, berbicara, berpikir dan bertindak dengan cara yang berbeda (Denzin dan Yvonna, 2009: 328). Inti pokok dari metode penelitian etnografi ialah cara untuk memperhatikan arti-arti atau makna tindakan dari kejadian-kejadian yang menimpa individu atau masyarakat yang ingin kita kaji dan pahami. Beberapa dari arti atau makna tersebut dapat terekspresikan baik itu secara tidak langsung maupun terkspresikan secara langsung di dalam sebuah bahasa dan di antara makna yang kita peroleh. Banyak juga yang disampaikan hanya secara tidak langsung melalui kata-kata dan perbuatan (James P. Spradley, 2007 :4-5).

Tulungagung dan Budayanya

Kabupaten Tulungagung ialah salah satu daerah tingkat dua yang terletak di Propinsi Jawa Timur. Kabupaten ini sebagian wilayahnya merupakan kawasan perdesaan yang tentunya identik dengan pertanian. Kabupaten ini terletak di daerah Mataraman dengan pusat pemerintahan ada di Kecamatan Tulungagung. Daerah ini dikenal dengan pusat penghasil tambang marmer terbesar di Indonesia. Kabupaten Tulungagung berjarak 154 kilometer sebelah barat daya Ibukota propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya. Kabupaten Tulungagung memiliki batas-batas wilayah antara lain sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek. Batas Sebelah selatan dengan Samudera Hindia. Batas sebelah timur dengan Kabupaten Blitar sedangkan batas sebelah utara adalah dengan Kabupaten Kediri.

Dilihat dari segi topografi, Kabupaten Tulungagung terletak pada ketinggian 85 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Tulungagung beribukota di Kecamatan Tulungagung yang terletak tepat di tengah Kabupaten Tulungagung. Kabupaten Tulungagung terbagi menjadi 19 kecamatan. Dari 19 kecamatan tersebut dibagi menjadi 257 desa dan 14 kelurahan. Di tengah-tengah Tulungagung terdapat sungai yang bernama Kali

Ngrowo yang merupakan anak dari Kali Brantas dan menjadikan Tulungagung menjadi dua bagian yakni bagian utara dan selatan. Sungai yang membelah Tulungagung ini disebut dengan Kali Parit Raya atau Kali Parit Agung. Topografi bagian barat laut Tulungagung adalah daerah pegunungan yang merupakan bagian dari pegunungan Wilis-Liman. Bagian tengah adalah dataran rendah, sedangkan bagian selatan adalah pegunungan yang merupakan rangkaian dari Pegunungan Kidul. Di sebelah barat laut Tulungagung, tepatnya di Kecamatan Sendang, terdapat Gunung Wilis sebagai titik tertinggi di Kabupaten Tulungagung yang memiliki ketinggian 2552 meter di atas permukaan laut.

Penduduk Tulungagung selain mengandalkan hasil pertanian dari juga memelihara hewan ternak seperti ayam kampung, ayam broiler dan ayam petelur yang menghasilkan telur untuk dijual sebagai tambahan pendapatan. Hewan ternak lain yang dipelihara adalah sapi, kambing, itik, dan bebek yang juga memiliki nilai ekonomis tinggi untuk dijual sebagai tambahan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masyarakat Tulungagung selain memelihara hewan ternak darat juga memelihara hewan ternak air seperti ikan lele dan gurami yang juga mempunyai nilai ekonomis tinggi. Semua itu dilakukan selain untuk memenuhi kebutuhan juga karena lingkungan perdesaan yang mendukung untuk memelihara hewan ternak. Hampir semua warga masyarakat di sini memelihara hewan ternak walaupun hanya ayam kampung yang hanya bisa untuk memenuhi kebutuhan lauk pauk bagi warga itu sendiri. Selain itu penduduk Tulungagung juga bekerja di sektor industri, hal ini bias dilihat banyaknya pabrik atau perusahaan yang ada di Tulungagung baik itu perusahaan barang maupun perusahaan jasa.

Tulungagung sebagai salah satu pusat kota budaya menyimpan berbagai macam budaya yang menarik untuk dikaji dan dipelajari. Salah satunya adalah kajian tentang Islam Jawa yang semakin meningkat popularitasnya di era ini. Penelitian

Mark Woodward tentang Islam Jawa di Tulungagung lebih cenderung dipusatkan di daerah perkotaan terutama Islam di kalangan priyayi dan belum menyasar di kalangan Islam Jawa di daerah pesisir pantai. Secara sosiologis manusia memang mempunyai hasrat *gregariousness* yakni menjadi satu atau sama dengan lingkungan sosialnya dan menjadi satu atau sama dengan lingkungan alamnya.

Kondisi struktur sosial budaya masyarakat Tulungagung memang tidak bisa dilepaskan dari yang namanya *sinkritisme* berbagai macam budaya. *Sinkritisme* tersebut bukan hanya antara Islam dengan Jawa tetapi Katolik atau Kristen dengan Jawa ini dibuktikan dengan banyaknya gereja Kristen Jawa dan Gereja Katolik Jawa yang ada di daerah ini. Misalnya jelas merupakan bentuk sinkretis agama Jawa di era pascamodern yakni ketika kekuasaan itu lentur seringkali agama digunakan sebagai alat atau kendaraan dan sulit sekali membedakan mana yang profan dan mana yang sakral. Ketika agama tidak seiring dengan kekuasaan, tradisi ataupun adat istiadat seringkali dijadikan filter atau penyaring begitu seterusnya, sehingga sinkretisme telah larut ke berbagai segi kehidupan demi tercapainya tujuan tertentu (yang mulia). Tentunya kita ingat dengan teori *grand narration* atau narasi besar dari Lyotard bahwa di balik sebuah cerita besar dalam kehidupan selalu ada aktor utama yang muncul dan mendominasi cerita besar tersebut.

Orang Jawa di kawasan kejawen biasanya memiliki kesetiaan terhadap sebuah tradisi yang lebih eksklusif. Tradisi eksklusif yang dimaksud adalah kebatinan Jawa. Penghayat termasuk pengikut kebatinan Jawa yang masih melakukan tradisi *tapa*, *nenepi*, *matiraga*, *mutih* dan sebagainya. Umumnya mereka menjalankan laku spiritual semacam itu pada hari-hari khusus seperti pada hari *malam Selasa Kliwon* dan *malam Jumat Kliwon*, Hal ini yang menyebabkan wilayah kejawen di Tulungagung banyak didiami oleh kaum kebatinan Jawa. Tulungagung sebagai wilayah kejawen tentu tidak lepas dari

dunia penghayat yang masih taat melakukan ritual di ruang-ruang tertentu. Hal ini berarti istilah kejawen (*javaisme*) sebenarnya juga terkait dengan ruang-ruang spiritual, geografis dan tradisi yang dilaksanakan. Ruang spiritual kejawen tidak sekedar tempat melainkan melukiskan konteks sosial budaya penghayat yang banyak mempertimbangkan laku dalam kehidupannya.

Laku-laku spiritual penghayat pada umumnya dilaksanakan pada ruang-ruang yang dianggap sakral. Keadaan sosial budaya masyarakat di Tulungagung memang tidak semuanya didominasi oleh para penghayat. Kebanyakan mereka adalah *double identities* atau identitas ganda yakni secara administrasi mereka beragama islam menjalankan ibadah sesuai dengan agama islam tetapi mereka juga melakukan laku-laku spiritual kejawen seperti *laku tapa* atau *semedi*, *jaman pusaka*, *labuhan* atau larungan sesaji ke laut selatan setiap malam satu Suro atau hari lainnya. Laku-laku spiritual yang dilakukan oleh masyarakat Islam Jawa di pesisir tersebut merupakan *asketisme* atau jalan lurus untuk berlatih mengendalikan diri. Secara psikologis mereka yang merindukan penciptanya dia akan berusaha untuk melakukan hal-hal yang sifatnya *transedental* seperti laku tirakat yang tujuannya adalah untuk mencapai kemuliaan dan keutamaan dalam hidup sehingga hidup akan menjadi tenang.

Secara umum masyarakat Islam Jawa di Pesisir Tulungagung juga banyak melakukan budaya seperti masyarakat lainnya seperti slametan orang meninggal seperti 3 hari, 7 hari, 100 hari, setahun, dua tahun, seribu hari. Slametan bayi mulai dari *telonan*, *tingkepan*, *pitonan* dan lain-lain ditambah dengan berbagai macam adat waktu ada yang hajatan menikah dan lain-lain. Masyarakat pesisir identik dengan masyarakat tradisional atau mekanik, menurut Durkeim masyarakat mekanik mempunyai ciri yakni masyarakatnya homogen, bersifat kolektif atau kebersamaan kuat, nilai norma ataupun adat istiadat masih kuat dan belum ada pembagian kerja karena

selalu identik masyarakat pertanian. Dari kondisi tersebut bisa dilihat bahwa sanksi sosial atau *social punishment* yang efektif dilakukan adalah pengucilan atau pengasingan masih cocok diterapkan di masyarakat Islam Jawa di Pesisir Tulungagung.

Politik Aliran dan Politik Transaksional

Agama menurut Geertz selalu diidentikkan dengan simbol-simbol tertentu. Geertz mengklasifikasikan orang Jawa menjadi santri, priyayi dan abangan. Santri identik dengan menjalankan Islam sesuai dengan iman dan *ihsan* sedangkan abangan diidentikkan dengan beragama Islam tapi tidak menjalankan ajaran agamanya sedangkan priyayi lebih cenderung mereka yang dianggap punya secara relasi kuasa. Salah satu simbol agama yang dipakai santri adalah selalu memakai sarung tetapi hal ini tidak berlaku di masyarakat Islam Jawa pesisir dikarenakan sarung sudah menjadi pakaian sehari-hari banyak orang baik itu santri, priyayi maupun abangan. Dalam hal slametan juga tidak ada dikotomi antara santri, priyayi dan abangan karena semuanya dianggap sama dan datang jika diundang dalam acara tersebut. Kehidupan Islam Jawa di pesisir juga Pendapat Geertz ini juga mengilhami dalam pilihan politik juga di masyarakat Islam Jawa atau lebih terkenal dengan politik aliran.

Politik aliran sangat erat kaitannya dengan agama orang Jawa yang diteliti dan ditulis oleh Clifford Geertz yakni orientasi individu untuk memilih partai politik yang bisa dikategorikan menjadi santri, priyayi dan abangan. Aliran tersebut dikenal di masyarakat Jawa yakni santri lebih banyak berpusat di pasar atau perdagangan, priyayi di lingkungan pemerintahan dan abangan lebih berpusat di pedesaan.

Semakin berkembangnya teknologi dan komunikasi serta meluasnya paham kapitalisme maka lama-kelamaan politik aliran mulai memudar di masyarakat baik itu perkotaan dan pedesaan. Orientasi materi dan waktu yang berharga mengharapka adanya timbal balik dengan pamrih yang

sepadan, maka muncullah istilah politik transaksional yang berorientasi pada kepentingan individu atau kelompok.

Tentang politik aliran yang berdasarkan pada aliran santri, priyayi dan abangan Pesisir Selatan semakin memudar. Mulai memudarnya politik aliran dikarenakan adanya paham kapitalis dan modernisasi yang berorientasi pada *pragmatis transaksionalis*,⁵ ini berarti bahwa ketika seorang caleg atau partai ingin dipilih maka dia harus menyiapkan banyak materi dan siap bertransaksi dengan masyarakat dan membeli suara masyarakat, dan ketika caleg menawarkan materi untuk mendapatkan suara maka biasanya masyarakat juga menawarkan berapa membayar suara sehingga terjadilah tawar-menawar dan biasa disebut "*politik wani piro*".

Pada pemilu 2014 lalu, di Tulungagung dimenangkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. PDIP memiliki basis massa yang kuat di akar rumput. Basis massa PDIP terdiri dari para kaum marhaenis yakni petani dan buruh. Partai pemenang pemilu di Tulungagung setelah PDIP adalah Gerindra kemudian PKB, Hanura, Golkar, PAN, Demokrat, PKS, Nasdem, PBB. Gambaran ini menunjukkan bahwa politik aliran yang dikemukakan Geertz sudah bergeser di Tulungagung.

Hal di atas diperkuat ketika peneliti mewawancarai tokoh masyarakat di Tulungagung yang menyatakan bahwa politik di Kabupaten Tulungagung sangat dinamis dan cenderung dipengaruhi oleh figur ketokohan dari *Nahdhatul Ulama* sehingga cenderung penduduk *Nahdhiyin* memilih PKB (Partai Kebangkitan Bangsa). Tapi ternyata hal itu tidak terbukti semua benar. Setelah dibuktikan dengan terjun ke lapangan langsung dan observasi serta wawancara dengan informan ditemukan bahwa orientasi politik penduduk Kabupaten Tulungagung bukanlah orientasi politik aliran, melainkan adalah politik transaksional. Politik transaksional ini lebih

⁵ Istilah yang berarti bahwa kegiatan transaksi atau jual beli yang berorientasi untuk kepentingan tertentu bukan untuk visi ke depan.

mengarah kepada pertukaran suara konstituen dengan barang dan jasa apa yang bisa mereka terima atau keuntungan semata.

Hasil ini pertama kali ditemukan melalui penuturan sendiri sendiri dari beberapa tokoh masyarakat di Tulungagung. Mereka menyatakan bahwa sejak Orde Baru bahwa di Kabupaten Tulungagung partai pemenangnya adalah Golkar, sedangkan urutan pemenang pada pemilu 2014 kemarin adalah PDIP, Gerindra, PKB. PDIP bisa menang bukan karena figur ketokohan, tapi lebih cenderung banyaknya kader PDIP yang terjung langsung menemui masyarakat atau istilahnya adalah blusukan. Begitu juga kader-kader di partai lain mereka cenderung menemui langsung para calon pemilih untuk menawarkan program kerja mereka selama 5 tahun ke depan dan tidak jarang mereka juga menawarkan bantuan seperti pembangunan jalan, bantuan kepada kelompok sosial seperti pengajian bahkan bantuan uang langsung. Bahkan cenderung ada beberapa kader partai politik yang memberikan “serangan fajar” langsung kepada calon pemilih pada pagi hari di hari pencoblosan.

Politik transaksional yang terjadi di Kabupaten Tulungagung tersebut melalui tokoh-tokoh masyarakat, terutama mereka yang menjadi kader partai. Tidak jarang para birokrat juga menjadi kader partai politik tetapi dengan cara sembunyi-sembunyi. Biasanya kader tersebut masuk ke masyarakat dengan membawa langsung bantuan berupa materi dan uang bukan sekedar janji belaka lagi untuk diberikan kepada calon pemilih. Kemudian dari situ para tokoh masyarakat yang menjadi kader tersebut mengundang dalam sebuah rapat baik dalam tingkat RT (Rukun Tetangga), RW (Rukun Warga) hingga tingkat desa. Rapat tersebut selain dihadiri oleh tokoh masyarakat, kader ataupun calon juga dihadiri oleh tim sukses calon legislatif. Di dalam rapat tersebut akan membicarakan dalam sebuah forum bersama warga masyarakat dengan

“*masrahke*”,⁷ bantuan ke masyarakat ini ada bantuan dari caleg partai ini agar besok dicoblos atau tidak. Ketika yang masuk lebih dari satu kader partai, maka suara di tingkat RT tersebut akan dipecah untuk kader partai lainnya sehingga dalam satu kelurahan suara bisa terbagi antara satu partai dengan partai yang lain. Nilai bantuan yang diberikan sebuah kader partai juga menentukan jumlah suara di wilayah tersebut. Dengan kata lain perolehan suara berdasarkan pada nilai bantuan yang tinggi, semakin tinggi nilai bantuan yang diberikan, maka semakin tinggi pula suara partai yang diperoleh di wilayah tersebut.

Saat menjelang pemilu 2019 atau sebelum adanya pemilukada Tulungagung digelar memang sudah ada mobilisasi massa dari para kader partai masuk ke wilayah tersebut antara lain masuk ke dalam ibu-ibu pengajian yang diberi bantuan berupa seragam, uang lima ratus ribu dan *wireless* untuk pengajian. Selain itu bantuan pembiayaan terhadap ibu-ibu pengajian yang akan melakukan ziarah ke makam wali. Bantuan pembiayaan tersebut antara lain mulai dari transportasi, konsumsi hingga uang saku. Bantuan-bantuan dari para kader ataupun tim sukses cenderung menyasar kepada kelompok sosial termasuk jemaah *yasinan* atau *tahlilan* dikarenakan jumlah anggota dari kelompok sosial ini cenderung banyak dan anggotanya adalah kebanyakan ibu-ibu. Ketika yang menerima bantuan itu adalah ibu-ibu, jelas akan mempengaruhi anggota keluarga lain untuk memilih calon wakil rakyat atau calon kepala daerah tersebut. Pengajian tersebut rutin diadakan setiap malam Jumat dan malam Senin yang dipimpin oleh pemuka agama atau tokoh agama setempat. Khusus untuk malam Senin adalah pengajian dari ibu-ibu, dan malam Jumat pengajian bapak-bapak.

⁷ Kata *masrahke* adalah istilah Jawa yang berarti menyerahkan sepenuhnya sehingga semua dikembalikan pada orang yang menerima. Kata ini muncul ketika peneliti mewawancarai salah satu informan yakni bapak MJ yang beralamat di Kecamatan Tulungagung

Selain itu, bantuan juga berupa pertunjukan orkes dangdut di dusun tersebut. Kader partai yang sudah bergerak antara lain dari PDIP yang merupakan kader caleg PDIP daerah pemilihan Tulungagung. Selain itu, calon juga masuk ke dalam senam-senam kesehatan untuk ibu dan lansia yang diadakan setiap hari Senin, Rabu dan Jumat di salah satu rumah penduduk.

Calon banyak memilih pengajian ibu-ibu dan senam kesehatan untuk ibu rumah tangga dan lansia (lanjut usia) dikarenakan peluang ibu-ibu untuk mempengaruhi suaminya dalam pemilihan partai politik sangat tinggi dan besar karena ibu rumah tangga mempunyai peranan yang besar dalam roda perekonomian sebuah rumah tangga. Sedangkan alasan yang dipilih para kader partai kenapa memilih senam untuk lansia dikarenakan produktivitas pada usia lansia sudah menurun sehingga orang yang sudah lanjut usia cenderung ikut apa kata yang mempengaruhi dan tidak pikiran kritis (Ibu SK anggota pengajian ibu-ibu di wilayah Kecamatan Tulungagung, *Wawancara*).

Kader partai lain yang ikut turun langsung ke lapangan adalah mereka yang berasal dari Gerindra, PKB, PAN, Hanura, Demokrat dan partai lainnya. Di wilayah tersebut mereka mempunyai prinsip *“ora usah kakean omong, ora usah kakean tingkah mbuh kuwi ayu, bagus, elek nek ono duite yo dicoblos”*.¹⁰ Penduduk wilayah Tulungagung mempunyai prinsip bahwa waktu pemilihan atau pencoblosan masyarakat telah kehilangan banyak waktunya seperti tidak ke sawah atau bekerja untuk memenuhi kehidupan sehari-hari oleh karena itu waktu itu harus diganti dengan materi yang berasal dari para kader dan caleg partai politik sehingga ada imbalan dan transaksionalnya.

Dalam pemilihan atau pencoblosan masyarakat juga sudah terorganisir dan terkoordinir oleh tokoh masyarakat untuk mencoblos sesuai dengan transaksi yang telah disepakati oleh

¹⁰ Istilah ini sama dengan tidak usah kebanyakan bicara tidak usah kebanyakan tingkah walaupun calon itu ganteng, cantik, pintar kalau ada uangnya ya saya coblos, istilah ini sebagai bukti orientasi adanya politik transaksional

kader dan caleg tersebut sehingga masyarakat hanya ikut apa kata dari tokoh masyarakat tersebut. Penduduk Tulungagung sebagian besar adalah penganut muslim. Aliran Muhammadiyah dan NU di wilayah Tulungagung sudah tidak murni lagi karena sudah tercampur dengan budaya setempat yakni kenduri dan selamatan sehingga di sana tidak ada lagi batas tegas antara mana yang santri dan mana yang abangan karena sudah terakulturasi oleh tradisi Jawa. Kenduri atau selamatan di sana adalah sebuah tradisi wajib bagi semua agama dan apabila tidak berangkat kenduri akan terkena sanksi sosial berupa jika suatu saat mengadakan kenduri maka seluruh warga bersepakat untuk memboikotnya atau tidak berangkat.

Di wilayah Tulungagung ada tokoh adat atau biasa disebut dengan mbah kaum atau *rois*. Tugas *rois* adalah memandikan jenazah atau mengurus jenazah, memimpin tahlilan dan kenduri atau selamatan. Menurut para *rois* tersebut bahwa prinsip "*Bumi ki ancik-ancik tuwajikmu le urip*",¹¹ juga melandasinya untuk memilih partai atau caleg. Prinsip tersebut menandakan bahwa bumi itu adalah tempat untuk awal menginjakkan kaki untuk kehidupan akhirat sehingga mereka memilih partai politik yang bergambar bumi (PKB) untuk dicoblos. Sehingga hal ini yang menjadikan PKB pada pemilu 2014 bisa meraih no 3 di Tulungagung.

Kabupaten Tulungagung menjadi sorotan nasional bersama Propinsi Maluku Utara karena pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah pada tanggal 27 Juni 2018 dimenangkan oleh pasangan calon yang terkena operasi tangkap tangan dan sudah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Tulungagung sendiri dimenangkan oleh Pasangan Syahri Mulyo-Maryoto Bhirowo yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Nasional Demokrat. Syahri Mulyo sendiri

¹¹ Kalimat dalam bahasa jawa tersebut mengandung filosofi yang sangat tinggi dalam kehidupan transedental dengan Tuhan karena menganggap dunia ini hanyalah sementara dan sebagai arena untuk mencari saku ibadah yang sebanyak-banyaknya untuk kehidupan akherat nanti.

terkena operasi tangkap tangan KPK bersama Walikota Blitar dan ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi proyek pekerjaan jalan Dinas Pekerjaan Umum. Operasi tangkap tangan terhadap Bupati Tulungagung Petahana memang terjadi hanya satu bulan menjelang pemilukada di kota marmer itu.

Hal ini tentunya memunculkan banyak spekulasi salah satunya bupati petahana tersebut akan mengalami kekalahan dari lawan politiknya yakni pasangan Margiyono-Eko Prisdianto. Akan tetapi prediksi tersebut salah semua karena hasil pada pemilukada Tulungagung menunjukkan bahwa kemenangan diraih oleh pasangan petahana Syahri Mulyo-Maryoto Bhirowo sekalipun Syahri Mulyo sudah mendekam di rumah tahanan KPK. Korupsi jelas adalah sebuah kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime*, perlu tindakan yang luar biasa juga untuk mencegah atau memberantas kejahatan kerah putih ini. Memilih pemimpin yang jelas sudah menjadi tersangka korupsi adalah sebuah tindakan kontraproduktif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel atau *Good Governance* (Muhaimin, 2012:23).

Peneliti menemukan hal-hal yang menyebabkan masyarakat Tulungagung menjadi tertarik untuk memilih kembali pasangan petahana walaupun sudah terjerat kasus korupsi. Penyebab tersebut antara lain:

1. Masyarakat Tulungagung sudah merasakan dampak sosial dan ekonomi baik itu pembangunan infrastruktur maupun suprastruktur yang dilakukan oleh pasangan bupati-wakil bupati petahana sehingga sebagian besar masyarakat Tulungagung menginginkan pasangan petahana tersebut untuk kembali memimpin pada periode berikutnya walaupun pembangunan banyak yang dikorupsi.

2. Peristiwa operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK waktunya sangat berdekatan dengan adanya peristiwa pemilukada di Tulungagung sehingga masyarakat yang sudah menentukan pilihannya tidak terpengaruh oleh peristiwa operasi tangkap tangan. Berbeda misalnya jika OTT tersebut

terjadi tidak berdekatan waktunya dengan pemilukada seperti yang terjadi di Kabupaten Jombang.

3. Masyarakat Tulungagung tidak melihat pilihan dalam pemilukada berdasarkan pada politik aliran seperti yang diungkapkan oleh Clifford Geertz tentang santri, priyayi dan abangan tapi telah bergeser kepada politik transaksional yakni seberapa besar modal yang dimiliki, baik itu modal finansial maupun modal sosial dalam meningkatkan elektabilitas dan kepopuleran. Jadi bisa dilihat bahwa pencitraan yang selama ini dilakukan oleh petahana dalam masa kepemimpinannya maupun masa kampanye telah menciptakan pilihan yang kuat bagi masyarakat Tulungagung.

4. Partai pengusung pasangan petahana Syahri Mulyo dan Maryoto Bhirowo yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah partai pemenang pemilu tahun 2014 di Kabupaten Tulungagung dan mempunyai kursi DPRD kabupaten paling banyak di daerah ini. Selain itu basis massa partai berlambang banteng ini sangat kuat di akar rumput dan masyarakat kelas menengah ke bawah di Kabupaten Tulungagung. Basis massa PDI-P ini kebanyakan adalah para kaum marhaenis atau abangan menurut Geertz dan kebanyakan mereka akan loyal kepada pilihan mereka. Basis massa ini kebanyakan ada di wilayah perdesaan di Tulungagung.

5. Para birokrat di Kabupaten Tulungagung cenderung memihak kepada pasangan petahana karena selama ini mereka menganggap hubungan mereka adalah *patron-client*, karena memang selama ini kebanyakan mereka mengabdikan kepada atasan bukan kepada rakyat. Birokrat sendiri walaupun netral tapi cukup banyak mempengaruhi pilihan masyarakat itu sendiri lewat kampanye-kampanye terselubung.¹⁴

Penutup

¹⁴ Hasil kesimpulan peneliti dari berbagai wawancara di berbagai wilayah di Tulungagung antara lain di Pagerwojo, Tulungagung dan Pucanglaban mengenai kemenangan pasangan Syahri Mulyo dan Maryoto Bhirowo dalam Pilkada serentak Tulungagung tahun 2018

Sudah tidak tepat lagi pembagian politik aliran yang mengacu kepada santri, priyayi dan abangan dengan mengatakan bahwa santri cenderung ke partai Islam seperti PKS, PKB dan PAN, kemudian Priyayi ke Golkar dan Demokrat serta abangan ke PDIP sedikit banyak terbantahkan. Pertama untuk masalah aliran sendiri seperti santri, priyayi dan abangan di Kabupaten Tulungagung tidak ada batas tegas di antaranya karena semua masyarakat sama yakni ikut kenduri atau slametan tidak ada yang terkecuali yang dulu hanya diikuti oleh abangan saja. Selanjutnya mengenai masalah pengajian bahwa semua warga termasuk bapak dan ibu juga ikut semua tidak terkecuali sehingga dulu pengajian hanya diikuti kaum santri sekarang sudah ikut semua. Dengan demikian, dalam masyarakat Jawa terutama di Kabupaten Tulungagung tidak ada lagi santri, priyayi dan abangan.

Mulai memudarnya politik aliran dikarenakan adanya paham kapitalis dan modernisasi yang berorientasi pada *pragmatis transaksionalis*, ini berarti bahwa ketika seorang caleg atau partai ingin dipilih maka dia harus menyiapkan banyak materi dan siap bertransaksi dengan masyarakat dan membeli suara masyarakat. Ketika caleg menawarkan materi untuk mendapatkan suara, maka biasanya masyarakat juga menawar berani berapa membayar suarasehingga terjadilah tawar menawar dan biasa disebut "*politik wani piro*".

Daftar Rujukan

- Arif, Saiful. 2011. *Demokratisasi Sistem Politik dan Pemerintahan*. Malang: Averroes Press.
- Blaikie, Norman. 2000. *Designing Social Research*. Cambridge: Polity Press.
- Creswell, John W. 2007. *Qualitative Inquiry & Research Design, Choosing Among Five Approch*. California: Sage Publications.
- Denzin, Norman K. 2009. *Handbook Of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Geertz, Clifford. 1959. *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya

- Haboddin Muhtar. 2012. *Menguatnya Politik Identitas Di Ranah Lokal*. Jurnal Studi Pemerintahan nomor 1 Februari 2012.
- Hadiz, Vedi R. 1999. *Politik Pembebasan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jamil, M.Muhsin. 2005. *Tarekat dan Dinamika Sosial Politik:Tafsir Sosial Sufi Nusantara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mintarja, Endang. 2006. *Politik Berbasis Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhaimin. 2012. *Golput Dalam Optik Kaum Santri*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nasution, Adnan Buyung. 2011. *Demokrasi Konstitusional*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Nurjaman, Asep. 2012. *Pola Hubungan Partai dan Pemilih di Tengah memudarnya Politik Aliran*. Malang: Citra Mentari.
- Raharjo. 2004. *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rais, Amien. 1999. *Suksesi dan Keajaiban Kekuasaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sajogyo dan Pudjiwati. 2005. *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sorensen, Georg. 2014. *Demokrasi dan Demokratisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.